

KEPINGAN uang logam itu tidak memenuhi seluruh dasar kotak kaca transparan berukuran 20x30 sentimeter. Padahal, kotak itu sudah teronggok di depan ruang rapat Komisi III DPR RI sejak Senin (24/1) sore. Hampir semua orang yang lewat melihat kotak bertuliskan 'Koin Untuk Presiden'. Tidak jelas siapa yang meletakkannya di depan ruang

pimpinan Komisi III. Kotak yang biasanya digunakan untuk voting itu, mendadak muncul seusaia jeda pertama rapat kerja antara Komisi III dan jajaran kepolisian. Tidak ada yang mau mengaku siapa inisiatornya. Ahmad Yani dari Fraksi PPP

hanya mengangkat bahu ketika ditanya siapa pelopor gerakan kumpul koin yang mirip aksi 'Koin Untuk Prita' tersebut. "Saya tidak tahu, tapi saya lihat ada koin itu," ujarnya sebelum rapat paripurna, kemarin. Jawaban senada juga datang dari anggota Fraksi Golkar

Nudirman Munir. "Saya juga kaget ada kotak itu, siapa yang merancang? Itu kurang bagus, karena akan menyentuh perasaan Presiden. Dia akan tersinggung. Tapi sebagai negarawan harus melihat, inilah rakyat kita. Lain kali jangan mengeluhkan masalah

pribadi," tuturnya. Saat jeda rapat, beberapa anggota dewan seperti Nasir Jamil, Bambang Soesatyo, Syarifuddin Sudding, dan Edy Ramli Sitanggang sempat mengobrol ringan soal gerakan koin untuk Presiden. Namun Nasir membantah mereka

menjadi inisiator gerakan itu. "Tidak ada inisiator. Itu spontan, kami tidak menyuruh orang membuat itu. Kami bicara ada gerakan di luar parlemen soal koin itu. Ketika keluar sudah ada kotak, siapa yang meletakkannya masih misterius," kilah Nasir.

Sebaliknya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai gerakan koin sebagai sinisme politik. "Kumpul koin bukan kritik demokrasi. Itu lebih merupakan cermin dari sinisme dan kenyinyiran politik yang tidak mengesankan," tutur Anas melalui pesan singkat kepada wartawan. Kotak itu kini hilang dari tempatnya. (Wta/R-2)

Kotak Koin Misterius untuk Presiden



PEMERINTAHAN DESA: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disambut para kepala desa dari Sumatra, Jawa, dan Bali, sebelum acara seminar sehari tentang pentingnya UU Pemerintahan Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, di Jakarta, kemarin.

Testimoni KPU Beratkan Saksi Palsu

SIDANG kasus kesaksian palsu Ratna Mutiara dalam pemilihan umum kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin. Empat saksi yang dihadirkan terdiri dari Wakil Bupati Kotawaringin Barat Eko Sumarno, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kobar Oscar Vyaris, dan dua anggota KPU lainnya yakni Awaluddin dan Toni Pandiangan.

Kesaksian Ratna yang menyebutkan dirinya pernah berkunjung ke rumah Ratna di Desa Kebun Agung, mengada-ada. Dirinya pun membantah pernyataan Ratna yang menyebutkan Sugianto menjanjikan kebun sawit sebanyak 2 hektare per orang. "Saya tidak pernah membagi-bagikan uang ke desa itu. Saya saja tidak pernah menginjakkan kaki di desa itu. Ngadio (Kepala Desa Kebun Agung)

waringin Barat (Kobar). Tapi keputusan itu digugat duet Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. MK, atas kesaksian Ratna, akhirnya mendiskualifikasi Sugianto-Eko. Kesaksian Ratna yang menyebutkan dirinya pernah berkunjung ke rumah Ratna di Desa Kebun Agung, mengada-ada. Dirinya pun membantah pernyataan Ratna yang menyebutkan Sugianto menjanjikan kebun sawit sebanyak 2 hektare per orang. "Saya tidak pernah membagi-bagikan uang ke desa itu. Saya saja tidak pernah menginjakkan kaki di desa itu. Ngadio (Kepala Desa Kebun Agung)

panwaslu ke KPU, khususnya di Kebun Agung," jawab Oscar. Dalam sidang terdahulu, sebanyak empat saksi yang keseluruhannya warga Kebun Agung, turut memberi saksi yang cukup memberatkan Ratna. Mereka mengaku telah diperalat Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. "Kami adalah 2 dari 68 saksi yang diajukan penggugat ke MK kala itu. Kami mohon maaf. Kebodohan kami dimanfaatkan penggugat. Kami mengikuti saja apa yang diinginkan mereka kala itu, bahkan disuruh berbohong di depan MK," terang Kusniyati, salah satu saksi di persidangan MK. (* / P-4)

Proyek Gedung Baru DPR seperti Sulap

Setjen tidak mungkin menjalankan proyek tanpa adanya persetujuan dari pemangku kepentingan.

MIRZA ANDREAS

RENCANA pembangunan dan maket gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata baru tercetus pada periode 2009-2014. Padahal sebelumnya Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mengatakan proses perencanaan itu telah berlangsung sejak 2008.

Hal itu diungkapkan mantan Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 Zaenal Maarif ketika dihubungi *Media Indonesia*, kemarin.

Ia menyatakan selama periode kepemimpinannya, sama sekali belum pernah disinggung rencana pembangunan DPR apalagi keluarnya maket gedung baru DPR. Munculnya rencana pembangunan gedung baru DPR yang menyedot anggaran lebih dari Rp1 triliun dalam waktu singkat tersebut bak 'sulap'. "Jangankan dibahas, terlintas pun tidak. Mungkin ini bukan keinginan murni dari DPR," ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh pada 18 Januari memaparkan persiapan rencana pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp1,3 triliun dilakukan pada 2004-2009, dan sejauh ini telah menghabiskan Rp14,7 miliar. Dana itu digunakan, antara lain untuk kajian masterplan gedung DPR oleh PT Virama Karya

dengan biaya Rp4,1 miliar. Selain itu, perencanaan oleh PT Yodya Karya (Persero) senilai Rp4,4 miliar. Sementara itu, untuk manajemen konstruksi ditangani PT Ciria Jasa dengan nilai Rp360 juta. Semua pekerjaan itu sudah selesai pada 2008.



Zaenal Maarif
Mantan Wakil Ketua DPR

Selanjutnya, pada 2009 pekerjaan untuk konsultan perencanaan dengan nilai proyek lebih dari Rp1 miliar ditangani PT Yodya Karya yang ditunjuk langsung karena hanya mengerjakan proyek lanjutan. Hasil kajian menunjukkan perubahan jumlah lantai gedung. Semula 27 lantai menjadi 36 lantai.

Harus dicari

Keterangan itu langsung dibantah Zaenal. Ia menjelaskan, pimpinan DPR saat itu hanya menyetujui pembuatan *grand design block plan* kompleks MPR/DPR. Eksekusi pembuatan maket itu ada di Setjen DPR. Namun, menurutnya, Setjen pun tidak mungkin menjalankan perintah itu tanpa

adanya persetujuan dari pemangku kepentingan. "Nah, itu yang harus dicari, siapa yang perintah Sekjen DPR membuat maket," ujarnya.

Dia pun mengatakan keinginan membangun gedung baru itu sebenarnya di luar kebutuhan. Zaenal yang pernah menjabat pemimpin tim reformasi DPR pun mengatakan rencana pembangunan gedung itu tidak termasuk sebagai program reformasi DPR.

Ketua DPR RI, yang juga menjabat Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Marzuki Ali enggan berkomentar terkait dengan munculnya penolakan dari fraksi-fraksi terhadap rencana pembangunan tersebut. Sebelumnya, Marzuki sempat menyatakan akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas penolakan beberapa fraksi. Namun, ketika dimintai konfirmasi, Marzuki menolak untuk memberikan keterangan.

"Untuk berikutnya silakan ditanyakan kepada wakil ketua, Mas Priyo (Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar) dan Mas Pram (Pramono Anung dari Fraksi PDIP)," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Hanura DPR Syarifuddin Sudding mengaku pernah ditawarkan uang dan imbalan oleh penggagas proyek gedung baru DPR itu. Pihak yang menawarkan imbalan itu bertujuan agar ia memberi persetujuan rencana pembangunan gedung baru. Ia pun menolak tawaran tersebut. (* / P-4)

mirza@mediaindonesia.com

Pembelaan Bahasyim tidak Berdasar

TIM jaksa penuntut umum yang diketuai Fachrizal dalam replik (tanggapan atas nota pembelaan) menilai seluruh dalil pembelaan terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang Bahasyim Assifie tidak berdasar hukum.

Pembelaan yang disampaikan Bahasyim pada persidangan Senin (24/1) lalu, menurut jaksa, sangatlah lemah karena terdakwa tidak mampu membuktikan berbagai usaha yang pernah dilakukannya untuk menghasilkan uang sebesar Rp30 miliar sebelum tahun 2002.

“Karena adanya rasa takut usahanya akan diganggu, saksi Kartini menyetujui untuk memberi uang sebesar Rp1 miliar.”

Fachrizal
Jaksa penuntut umum

"Seluruh dalil pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum dan bahkan telah mengabaikan hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan," ujar Fachrizal saat membacakan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Karena itu, jaksa menuntut kepada majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono untuk

memutus Bahasyim bersalah dan harus dihukum seperti yang dituntut kepadanya, yakni 15 tahun dan denda Rp500 juta. Dalam pleidoinya, Bahasyim menyatakan penuntutan terhadapnya merupakan penzaliman dan mencari-cari kesalahan dengan mendasarkan pada dirinya selaku pegawai negeri sipil (PNS) pada Ditjen Pajak.

Tim jaksa juga menanggapi tuduhan Bahasyim dan penasih hukumnya yang menyatakan jaksa tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaan serta tindak pidana asal yang dilakukan Bahasyim.

Menurut jaksa, tindak pidana asal bukan mutlak merupakan perbuatan pidana yang harus dilakukan terdakwa, tetapi dapat juga dilakukan pelaku lain.

Untuk membuktikan asal-usul kekayaannya, jaksa telah membuktikan pidana asal yang dilakukan Bahasyim.

"Pada 3 Februari 2005, terdakwa mendatangi saksi Kartini Mulyadi di kantornya. Kartini selaku wajib pajak mengetahui bahwa terdakwa adalah PNS Ditjen Pajak. Kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada Kartini Mulyadi dengan alasan untuk perbaikan kantor. Karena adanya rasa takut usahanya akan diganggu, saksi Kartini menyetujui untuk memberi uang sebesar Rp1 miliar," urai Fachrizal. (* / P-2)

Baru
SUPRA X 125
RAJANYA MOTOR BEBEK

Sang Raja Tampil Makin Keren dengan Warna Baru

- Motor Bebek Injeksi Pertama di Indonesia
- Dipakai lebih dari 10 juta orang
- Tangguh dan Irit

TOP BRAND, CRYPTONIC, BEST DESIGN, BEST FUEL

www.welovehonda.com

One HEART. HONDA